



Pelaksanaan SPBE Sulbar 2023

Mustari Mula, S.Sos., M.A.P
Kepala Dinas Kominfo Prov. Sulbar



TANTANGAN PEMPROV SULBAR



SISTEM YANG TERPISAH-PISAH (SILO) DAN EGO SEKTORAL



REGULASI SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BELUM SINKRON DAN RAPIH TERSTRUKTUR



ATENSI PEJABAT OPD RENDAH/ENGGAN TRANSPARAN



PENGETAHUAN SPBE DAN KOMPETENSI SDM TIK TERBATAS



INFRASTRUKTUR YANG BELUM MAMADAI MEMENUHI STANDAR



40% OPD BELUM MATANG MENERAPKAN SPBE



BANYAKNYA APLIKASI DAN KETERGANTUNGAN TERHADAP VENDOR



DATABASE YANG TIDAK SINKRON



BELUM ADA PEDOMAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI



KEBIJAKAN DIGITALISASI DI SULBAR



- 1** Membuat kebijakan SPBE yang agile terhadap perkembangan digitalisasi (arsitektur dan peta rencana SPBE Provinsi)
- 2** Menjadikan pelaksanaan digitalisasi sebagai salah satu program prioritas
- 3** Memberi panduan perangkat daerah untuk melakukan transformasi yang terstandarisasi
- 4** Melakukan langkah integrasi sistem untuk mewujudkan ekosistem layanan dan satu data digital terintegrasi
- 5** Memfasilitasi peningkatan SDM talenta digital melalui bantuan Kemenkominfo dan pihak terkait lainnya
- 6** Memperjuangkan pengembangan infrastruktur TIK untuk penyediaan akses internet di blankspot area masyarakat
- 7** Mendorong pemanfaatan TIK untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahannya

1 Membuat kebijakan SPBE yang agile terhadap perkembangan digitalisasi (arsitektur dan peta rencana SPBE Provinsi)



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

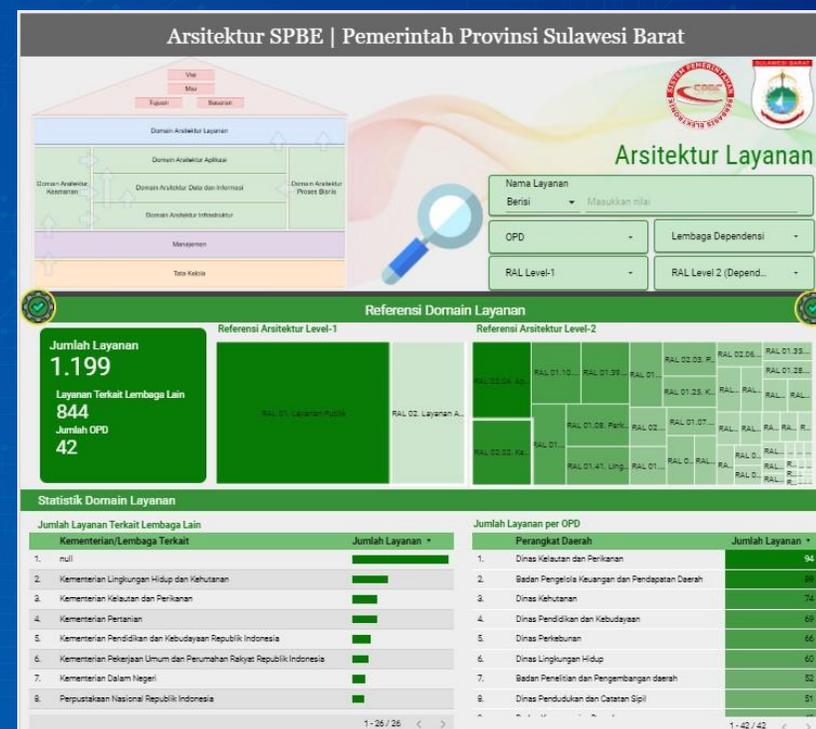
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE Nasional.

CIDS
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY

Arsitektur SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tim Penyusun
Center For Digital Society
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yuetisla 1, Bulaksumur, Yogyakarta



2 Menjadikan pelaksanaan digitalisasi sebagai salah satu program prioritas

MARI BERSAMA SUKSESKAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SULAWESI BARAT

PROF. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH
GUBURNUH SULAWESI BARAT

DR. MUHAMMAD IDRIS, M.Si
SEKRETARIS PROVINSI

- 1 **TUNTASKAN PENANGANAN MASALAH 4+1 (KEMISKINAN EXTREM, STUNTING, ANAK TIDAK SEKOLAH, KAWIN MUDA, & INFLASI)**
- 2 **OPD LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT**
- 3 **PENINGKATAN KUALITAS SDM & PELAYANAN PUBLIK**
- 4 **BRANDING DAN MARKETING PROVINSI SULAWESI BARAT**
- 5 **DIGITALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN**
- 6 **PERCEPATAN SATU DATA SULBAR MENUJU SATU DATA INDONESIA**
- 7 **REFORMASI BIROKRASI & KEBIJAKAN BERDAMPAK LANGSUNG PADA MASYARAKAT**
- 8 **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAERAH DAN PERKUAT MITIGASI BENCANA**

[pemprov_sulbar](#) [Pemprov Sulawesi Barat](#) [www.sulbarprov.go.id](#)

satudata.sulbarprov.go.id

Cetakgol IDN - YouT...

SapujagaT
Kelola Satu Data Sulbar
JaVest - SysDev

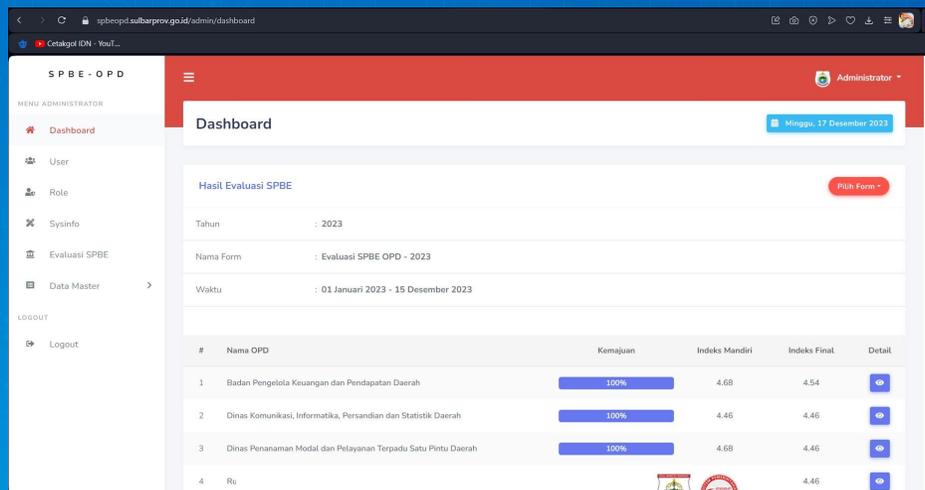
Username

Password [Lupa password](#)

Masuk

2022 © TH. Prasetyo

3 Memberi panduan perangkat daerah untuk melakukan transformasi yang terstandarisasi

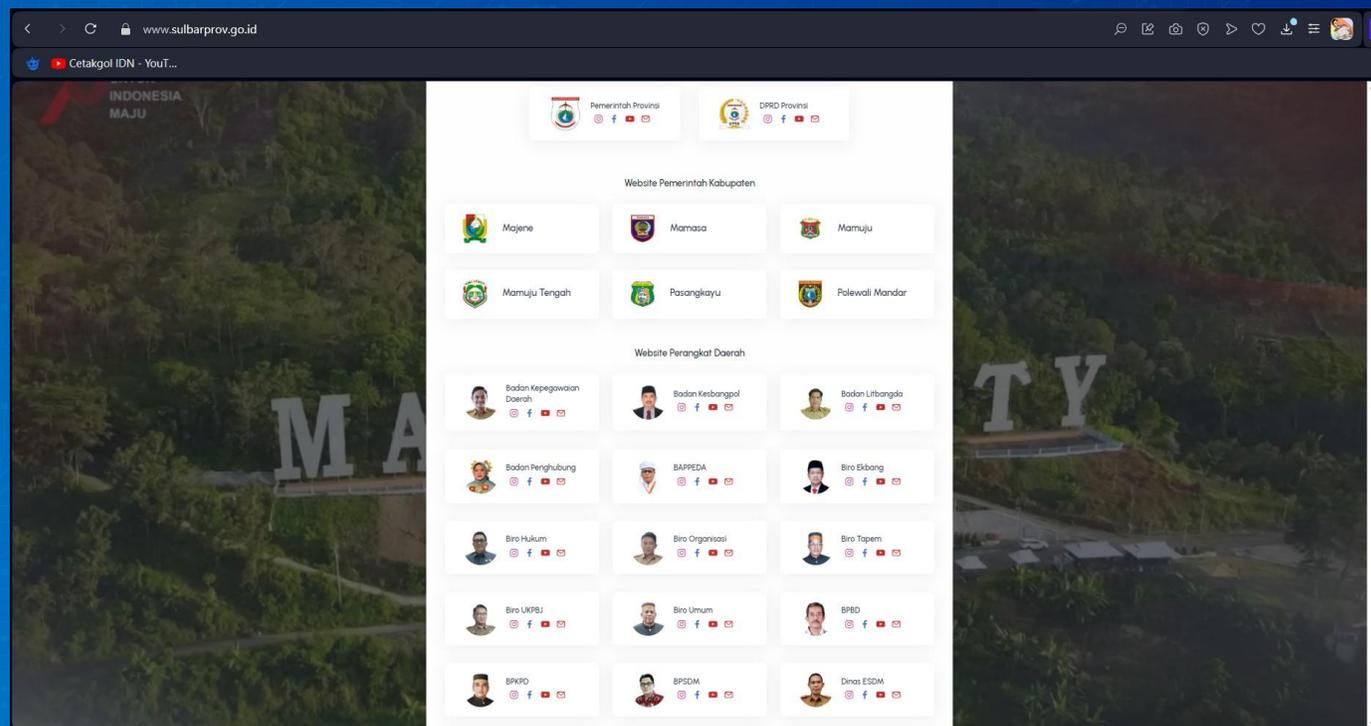


Tabel 4. Bobot Indikator Pada Domain Kebijakan

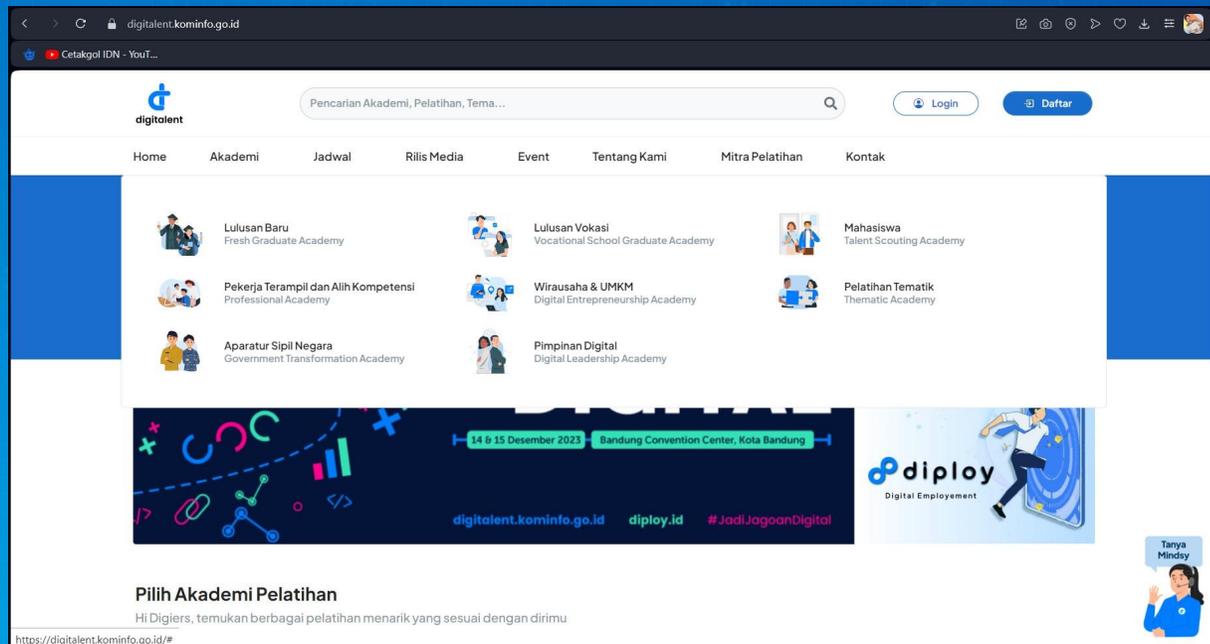
Nomor Indikator	Indikator	Bobot (%)
1	Tingkat kematangan Perencanaan, Anggaran, dan Pelaksanaan SPBE OPD	8
2	Tingkat kematangan Proses Bisnis OPD memiliki keterkaitan dengan area SPBE	8
3	Tingkat kematangan Pengorganisasian Tim SPBE OPD	6
4	Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
5	Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
6	Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Data Elektronik	2
7	Tingkat kematangan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia TIK	6
8	Tingkat kematangan Pemanfaatan virtual meeting dan Internet terpusat DISKOMINFO	4
9	Tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi Layanan OPD	2
10	Tingkat kematangan Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal	2
11	Tingkat kematangan Penggunaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	8
12	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan	2
13	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Penganggaran	2
14	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Keuangan	2
15	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa	2
16	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Kepegawalan	2
17	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Kearsipan Dinamis	2
18	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	2
19	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2
20	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja Pegawai	2
21	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Pengaduan Layanan Publik	2
22	Tingkat kematangan Pemanfaatan Aplikasi Data Terbuka	2
23	Tingkat kematangan Pemberian Layanan Informasi melalui Website	10
24	Tingkat kematangan Pemberian Layanan Informasi melalui Media Sosial	8
25	Tingkat kematangan Pemberian Layanan Berbasis Aplikasi Online	10
Total Bobot		100



4 Melakukan langkah integrasi sistem untuk mewujudkan ekosistem layanan dan satu data digital terintegrasi



5 Memfasilitasi peningkatan SDM talenta digital melalui bantuan Kemenkominfo dan pihak terkait lainnya



6 Memperjuangkan pengembangan infrastruktur TIK untuk penyediaan akses internet di blankspot area masyarakat



7 Mendorong pemanfaatan TIK untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahannya





Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat

Nomor 42 Tahun 2023

Pelaksanaan dan pengembangan SPBE OPD Pemprov. Sulbar

Sebagai arahan langkah implementasi yang terpadu dan terarah dalam proses transformasi agar SPBE/Digitalisasi pemerintahan dapat dilaksanakan setiap OPD dengan efisien menuju integrasi ekosistem pemerintahan digital Pemprov. Sulbar

- 1** Pelaksanaan dan pengembangan SPBE tidak hanya terkait pada penggunaan teknologi semata namun lebih utama pada terbangunnya pola kerja pemerintahan yang sistemik
- 2** OPD adalah pelaksana SPBE dan pelaku digitalisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi layanan internal maupun layanan kepada publik
- 3** Dinas Kominfo merupakan *leading sektor* yang bertugas melaksanakan SPBE dan bertanggungjawab pada pemanfaatan TIK secara makro provinsi serta menjadi fasilitator bagi seluruh OPD dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE
- 4** Pelaksanaan dan pengembangan SPBE OPD meliputi infrastruktur, aplikasi, peningkatan SDM, pengelolaan data digital dan hal lainnya diselenggarakan mesti berpedoman pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE yang sudah disusun oleh OPD masing-masing. Link dokumennya dapat diakses melalui : <https://spbe.sulbarprov.go.id>
- 5** Arsitektur dan peta rencana SPBE OPD berisi sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis pada urusan, tugas dan fungsi organisasi, layanan, serta proses bisnis dan kebutuhan data setiap OPD yang menjadi dasar rancang bangun pola kerja untuk selanjutnya dibuatkan sistem digital.
- 6** Pemanfaatan aplikasi UMUM wajib menggunakan aplikasi yang sudah ditetapkan KemenPAN-RB pada urusan pemerintahan utama sebagaimana ketentuan aturan yang berlaku. Untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi KHUSUS pada setiap OPD harus sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE yang dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia internal maupun berasal dari Kementerian/Lembaga, serta dapat mengadopsi dari pemerintah daerah lain yang bersedia berbagi pakai
- 7** Pemanfaatan aplikasi diarahkan sedapat mungkin 1 urusan pemerintahan 1 aplikasi dengan fitur yang lengkap memuat seluruh aspek sistem kerja dan data digital pada urusan tersebut. Jika aplikasi belum tersedia, pembangunan dan pengembangannya tidak lagi berbiaya dan akan dikerjakan oleh tim teknis SPBE Provinsi yang berada pada Dinas Kominfo. Antar aplikasi layanan ini akan saling terkoneksi sistem dan databasenya menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo



Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat

Nomor 42 Tahun 2023

Pelaksanaan dan pengembangan SPBE OPD Pemprov. Sulbar

Sebagai arahan langkah implementasi yang terpadu dan terarah dalam proses transformasi agar SPBE/Digitalisasi pemerintahan dapat dilaksanakan setiap OPD dengan efisien menuju integrasi ekosistem pemerintahan digital Pemprov. Sulbar

8

Untuk keterpaduan dan efisiensi, setiap pengembangan SPBE / digitalisasi OPD wajib dikoordinasikan ke Dinas Kominfo. Permintaan pengembangan tidak akan direspon jika muatannya tidak sesuai atau belum tertuang dalam arsitektur dan peta rencana SPBE

11

Peningkatan SDM talenta digital OPD akan terus disiapkan dan difasilitasi oleh Dinas Kominfo maupun BSPDM Provinsi, termasuk dukungan dari Kementerian Kominfo melalui program *Government Transformation Academy* (GTA) setiap tahun

9

Setiap OPD diminta mengalokasikan pembiayaan dukungan pelaksanaan SPBE dengan mekanisme rencana pembiayaan pengembangan SPBE tersebut mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kominfo sebagai dasar TAPD memberi persetujuan penganggarannya dalam APBD

12

Setiap OPD diminta membentuk Tim SPBE OPD untuk mengorganisir dan fokus melaksanakan SPBE serta terus mendiskusikan internal rencana pengembangan dan optimalisasi SPBE di instansinya masing-masing

10

Penyediaan perangkat jaringan internal OPD maupun peralatan TIK yang dibutuhkan disiapkan masing-masing sesuai standar yang sudah ditentukan spesifikasinya agar penggunaan lebih optimal dan tidak terkendala. Untuk langganan bandwidth internet dilaksanakan terpusat pada Dinas Kominfo, sehingga setiap OPD tidak diperkenankan berlangganan sendiri

13

Pelaksanaan dan pengembangan SPBE OPD secara detail telah tersedia panduannya pada link : spbeopd.sulbarprov.go.id . Untuk mengukur capaian kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah diatur tersebut, implementasi SPBE OPD akan dievaluasi setiap tahun dan menjadi salah satu indikator pembayaran TPP ASN tahun berikutnya



TERIMA KASIH

Kantor Gubernur Sulawesi Barat

**Jl. Abd. Malik Pattana Endeng
Rangas, Mamuju
www.sulbarprov.go.id**